

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan, Negara yang kaya akan sumber daya alam, Negara yang dikenal banyak memiliki bahasa daerah atau suku bangsa atau etnis. Akan tetapi, dalam konteks pembangunan, pemerintah Indonesia mengalami kendala yaitu geografis, sehingga untuk melaksanakan program pembangunan masih belum menyeluruh atau merata. Masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia baik wilayah bagian barat, tengah, timur maupun pedesaan dan perkotaan. Salah satu masalah kesenjangan tersebut adalah komunitas adat terpencil.

Menurut Direktorat Pemberdayaan KAT Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia KAT merupakan kelompok sosial budaya yang bersifat lokal, relatif kecil, tertutup, tertinggal, homogen, terpencar dan berpindah-pindah ataupun menetap, kehidupannya masih berpegang teguh pada adat istiadat, pada kondisi geografis yang sulit dijangkau, penghidupannya tergantung pada sumber daya alam setempat dengan teknologi yang masih sederhana dan ekonomi subsistem serta terbatasnya akses pelayanan sosial dasar (Departemen Sosial, 2004 : 11). Hal ini menekankan bahwa masyarakat adat terpencil ini memberikan gambaran tentang kondisi keterbelakangan, ketertinggalan dan terasingkan sehingga mereka terperangkap dalam kemiskinan. Masalah utama dalam hal ini adalah rendahnya perekonomian yang dipengaruhi oleh letak geografis, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang

kurang mendukung. Jika dibandingkan dengan warga Indonesia pada umumnya, kondisi kehidupan masyarakat desa ini jauh tertinggal.

Komunitas adat terpencil merupakan program yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial yang diturunkan ke Dinas Sosial untuk menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan sumber daya manusia dalam bentuk penggalian kreativitas, kemampuan diri. Pemberdayaan sangat penting dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan tercukupi. Pemberdayaan adalah pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat setempat untuk menentukan berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan mereka melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya. Pemberdayaan KAT merupakan proses pembelajaran sosial dengan menghargai inisiatif dan kreativitas KAT terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi sehingga masyarakat secara mandiri dapat mengaktualisasikan dirinya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mampu memecahkan permasalahannya.

Ada tiga strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan program tersebut dengan melakukan pendampingan, kemitraan dan partisipasi. Adapun program bagi KAT antara lain, sebagai berikut: pemberian rumah tinggal atau permukiman, program keluarga harapan (PKH), kelompok usaha bersama (KUBE).

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia menunjukkan bahwa populasi KAT pada tahun 2007 tercatat sebanyak

229.479 kepala keluarga (KK) di Indonesia. Populasi komunitas adat terpencil ini tersebar di 30 provinsi, dari jumlah tersebut, yang telah diberdayakan 73.609 KK, yang sedang diberdayakan sebanyak 12.425 KK dan KAT yang belum diberdayakan sampai dengan tahun 2007 mencapai 153.535 KK rata-rata 1 KK: 4 jiwa. Fakta ini memberikan gambaran bahwa proporsi KAT yang belum ditangani masih relatif besar 66,91 persen dibanding dengan yang diberdayakan 32,08 persen dan sedang diberdayakan 5,41 persen. Kalimantan Selatan kondisi tahun 2008 berdasarkan pemetaan sosial tahun 2007 komunitas adat terpencil yang ada di daerah tersebut tercatat 9274 KK yang tersebar di 9 kabupaten, 27 kecamatan dan 54 desa, sementara yang sudah diberdayakan berjumlah 3.456 KK 37,27 persen di 47 lokasi, yang sedang diberdayakan sebanyak 5.561 KK 59,96 persen dan tersebar di 49 lokasi (diambil dari situs www.kemensos.go.id diakses 23 Oktober 2016)

Pada tahun 2016, Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan program KAT di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Tabalong, Kecamatan Haruai Dusun Sialing. Tabalong merupakan salah satu Kabupaten di Kalimantan Selatan dengan ibukota Tanjung. Program KAT yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah pemberian rumah tinggal. Hal ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang respon masyarakat terhadap pemberian rumah tinggal dalam program KAT. Program KAT bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan angka kemiskinan di

Kabupaten Tabalong pada tahun 2015 mencapai 6,59 persen. Angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Tabalong mengalami kenaikan dari dua tahun sebelumnya, pada tahun 2013 angka kemiskinan mencapai 6,15 persen dan tahun 2014 6,21 persen.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan sosial di Kalimantan Selatan, selain itu anak terlantar, pengemis dan KAT. Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Tabalong melakukan pemberdayaan KAT melalui pemberian paket rumah tinggal, diharapkan dengan pemberian paket rumah tinggal bagi KAT ini dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Tabalong, yang dari tiga tahun belakangan ini angka selalu naik. Negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan warga negaranya, hal ini membuat Pemerintah Republik Indonesia melakukan upaya untuk hal tersebut dengan memberikan tugas kepada masing-masing bidang ke pemerintahannya. Berdasarkan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Tabalong di bawah perintah Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan pemberdayaan bagi KAT dengan memberikan paket rumah tinggal yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memberikan fasilitas atau pelayanan bagi KAT baik bidang sosial, pendidikan maupun ekonomi. Mereka mencari tempat tinggal yang dekat dengan mata pencahariannya, sehingga tidak heran jika mereka membuat rumah-rumah kecil. Ketika pemerintah datang untuk memberikan bantuan berupa rumah tinggal, respon masyarakat Dusun Sialing bermacam-macam, ada yang positif ada pula yang negatif, masyarakat yang memberikan respon positif adalah masyarakat yang menerima saat diberikan rumah tinggal, karena bagi mereka rumah tinggal itu penting akan tetapi mereka tidak bisa membuat rumah tinggal yang tetap karena keterbatasan pendapatan,

untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap harinya saja masih kekurangan. Namun, berbeda dengan masyarakat yang responnya negatif, awalnya mereka menolak pemberian rumah tinggal, dengan alasan bahwa mereka akan kehilangan mata pencahariannya. Hal menarik yang membuat peneliti melakukan penelitian di Dusun Sialing ini, bahwa program pemberian rumah tinggal bagi komunitas adat terpencil di Dusun Sialing tersebut merupakan bantuan pertama kalinya yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat Dusun Sialing. Selain itu, masyarakat yang mendapatkan rumah tinggal tersebut ada beberapa menolak program tersebut dengan beberapa alasan. Implementasi sebuah program pemberdayaan masyarakat perlu ditinjau lebih lanjut agar mengetahui sejauhmana pelaksanaan program pemberdayaan yang dijalankan oleh petugas pelaksana program tersebut. Penelitian ini juga memberikan gambaran tentang realisasi dari pelaksanaan pemberdayaan bagi KAT melalui pemberian rumah tinggal agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan KAT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberian paket rumah tinggal dalam pemberdayaan KAT di Dusun Sialing ?
2. Bagaimana respon sosial masyarakat terhadap pemberian paket rumah tinggal dalam program KAT ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pemberian paket rumah tinggal dalam pemberdayaan KAT di Dusun Sialing.
2. Untuk mengetahui respon sosial masyarakat terhadap pemberian paket rumah tinggal dalam program KAT.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tentang program pemberdayaan KAT di Kabupaten Tabalong dan dapat dijadikan kajian tentang pemberdayaan masyarakat, karena konsep dan teori pemberdayaan masyarakat juga berkaitan dengan program pemberdayaan KAT tersebut.
 - b. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan kajian keilmuan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang mengambil kajian tentang KAT.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang implementasi program pemberdayaan KAT mengenai respon sosial masyarakat terhadap pemberian rumah tinggal dalam program KAT.

b. Bagi pihak Desa.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak desa untuk mengetahui tentang implementasi program pemberdayaan bagi KAT yang ada di Dusun Sialing. Sehingga apabila ada program pemberdayaan KAT melalui pemberian rumah tinggal di Desa Nawin dapat menjadi lebih baik lagi dalam pelaksanaan program tersebut.

c. Bagi pihak Dinas Sosial

Manfaat dari penelitian bagi Dinas Sosial adalah dapat dijadikan bahan rujukan sebagai referensi atau rekomendasi agar dalam pelaksanaan pemberian rumah tinggal bagi KAT lebih efektif dan efisien.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang akan menjadi batasan bagi peneliti agar penelitian tidak perlu terlalu luas dan peneliti dapat menghindari ketidakfokusan dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti membuat ruang lingkup penelitian dalam mengkaji implementasi program pemberdayaan masyarakat KAT khususnya di Dusun Sialing. Ruang lingkup penelitian ini sebagaimana dimaksud dalam rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program pemberian paket rumah tinggal dalam pemberdayaan KAT di Dusun Sialing, meliputi, pelaksanaan program pemberdayaan KAT dapat dilihat dari berbagai aspek seperti, tahap pelaksanaan, waktu pelaksanaan, tata cara pelaksanaannya.
2. Respon sosial masyarakat terhadap pemberian paket rumah tinggal dalam program KAT, meliputi:

- a. Tanggapan masyarakat Dusun Sialing terhadap pemberian paket rumah tinggal tersebut.
- b. Respon negatif yang muncul pada masyarakat Dusun Sialing terhadap program pemberian paket rumah tinggal.

